RAKOR PERENCANAAN PASCA FORUM SKPD DAN MUSRENBANG TAHUN 2014

Pemalang, 3 April 2014

PENDAHULUAN

Dasar

- Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tahapan Perecanaan Pembangunan Daerah dan Desa
- Surat Ka Bappeda No. 005/370 ttg Undangan

Peserta

- Kasubag Perencanaan/TU SKPD
- Kasi PMD kecamatan

MATERI

- Setelah kegiatan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten, maka kepada SKPD diharapkan :
 - Mencermati narasi lampiran 1 RKPD 2015 (bab 1 sampai dengan bab 6), barangkali menemukan kesalahan substansial maupun redaksional serta ketidaksesuaian dengan kondisi SKPD masing-masing.
 - Revisi narasi dapat disampaikan dalam bentuk tertulis maupun koreksi dalam buku rancangan RKPD yang selanjutnya akan dijadikan bahan koreksi, koreksi tersebut agar dikirim ke Bappeda.

- Untuk koreksi lampiran 4 berupa matrik dapat dilakukan setelah website sim perencanaan dibuka pada hari kamisminggu, tanggal 3-13 april 2014. Mendasar pada pengamatan selama ini, lampiran matrik yang perlu dikoreksi antara lain; indikator keluaran yang belum terukur,
- Selain koreksi narasi, SKPD dapat mengentry koreksi usulan program dan kegiatan.

Mendasarkan pada hasil Forum SKPD Tahun 2014, maka perlu disampaikan bahwa karena ada kesalahan teknis, maka urutan prioritas hasil perlu di revisi. Kesalahan tersebut adalah bahwa kegiatan nomor urut 1 (Ds. Danasari Kec. Pemalang) rumus penjumlahannya masih kurang 2 penilaian (terdapat 7 meja penilai, yang di rekap hanya 5 meja penilai). Namun demikian untuk nomor urut 2 dan seterusnya rumusnya telah sesuai. Adapun urutan **prioritas** yang benar seperti terlampir*. Terhadap hal ini, kasi PMD Kecamatan agar dapat mengkomunikasikan seperlunya kepada delegasi maupun piphak yang berpekentingan.

- Usulan perencanaan program dan kegiatan ke provinsi
 - Usulan agar menjadi <u>agenda penting</u> bagi SKPD, baik <u>sektoral</u> (usulan untuk dilaksanakan oleh SKPD provinsi) maupun <u>bantuan keuangan</u> yang akan dilaksanakan oleh SKPD kabupaten Pemalang.
 - Usulan di entry oleh masing-masing SKPD ke website www://sippd-jateng.info dengan id dan password tunggal untuk bersama
 - Bappeda akan memfasilitasi rencana usulan sesuai tata waktu yang telah ditentukan.

- 4. SKPD lemtek dan dinas dapat mengajukan usulan sektoral. Sedangkan SKPD yang biasa mendapatkan bantuan keuangan adalah :
 - DPU, Dindikpora, Bappeda, Dipertanhut, DKP, BapermasKB
 - Usulan kegiatan dari bantuan keuangan harus dipersiapkan kelengkapan berupa proposal
 - Usulan2 tersebut baik sektoral maupun bantuan keuangan, akan di rakorkan dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) badan koordinasi wilayah (bakorwil) di Purwokerto. Setiap SKPD yang mengusulkan program dan kegiatan wajib hadir dalam musrenbang bakorwil tersebut karena akan diklarifikasi.

- 5. Usulan perencanaan program dan kegiatan ke pusat
 - Mendasarkan surat yang diterbitkan Bappeda, maka SKPD dapat mengusulkan program dan kegiatan dalam bentuk usulan sektoral, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus.
 - Usulan tersebut akan direkap oleh Bappeda yang selanjutnya akan di entry melalui website www.ukppd.bappenas.go.id
 - Mengingat tata waktu yang ketat, diharapkan SKPD dapat merespon usulan tersebut. Saat ini semua usulan telah dientry ke dalam website.

RKPD Tahun 2015 perlu dilengkapi dengan keterangan bahwa terdapat beberapa kegiatan di SKPD yang responsif gender. Kegiatan tersebut tidak harus mempunyai keluaran terhadap pilah gender, tetapi dapat juga yang responsif gender atau mempunyai dampak yang dapat dibedakan terhadap lakilaki maupun perempuan.

RENCANA TINDAK

1. SKPD agar segera mengentry Prioritas II hasil Forum SKPD, Prioritas I Non Fisik (matrik bahan forum) maupun hasil Reses anggota DPRD (matrik bahan reses)**. Dalam mengentry usulan hasil musrenbang maupun reses agar memedomani nomenklatur program dan kegiatan yang sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006. Revisi tersebut sekaligus agar mempertimbangkan kegiatan yang responsif gender dengan cara memberikan keterangan dalam kurung bahwa kegiatan tersebut masuk ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

- 2. Khusus SKPD DPU, agar dapat mengidentifikasi usulan hasil Forum SKPD tahun 2013 yang belum terealisir pada penetapan tahun 2014 untuk disusulkan mendapatkan bantuan keuangan pada Perubahan APBD Provinsi Tahun 2014, dengan kriteria:
 - Usulan kegiatan fisik baik jalan maupun jembatan adalah yang menghubungkan dengan kelas jalan provinsi.
 - Nilai pagu yang diusulkan minimal 200juta

- Mengingat semakin tingginya frekuensi koordinasi bidang perencanaan, diharapkan pejabat di bidang perencanaan memiliki sarana komunikasi yang memadai. Disarankan memiliki perangkat lunak media komunikasi sosial grup seperti watsap, line, bbm.
- 4. Untuk mengoptimalkan komunikasi dan informasi, diharapkan SKPD mengakses situs http://bappedapemalang.info
- 5. Pin bbm Indra: 75b78031, Aji: 7634b0fb
- 6. Hp watsapp aji: 08156562734

TERIMA KASIH